



Manajemen Kolaboratif dalam Penanganan Kemiskinan sebagai Upaya Pencapaian SDGs di Indonesia

Frea Rifda Zuleyka^{1*}, Andra Wahyu Mulyo Wicaksono², Meirinawati³, Indra Devian Lumban Gaol⁴

¹⁻⁴Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email: 25112064058@mhs.unesa.ac.id^{1*}, 251120640889@mhs.unesa.ac.id², meirinawati@unesa.ac.id³, indrugaol@unesa.ac.id⁴

*Penulis Korespondensi: 25112064058@mhs.unesa.ac.id

Abstract. *Poverty remains a major problem in Indonesia due to its complex and multidimensional nature, which is closely interconnected with various aspects of community life. This study aims to analyze the application of collaborative management in poverty alleviation as an effort to support the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia. The research employs a descriptive method with a qualitative approach through the collection of data from journals, online media, official documents, and various information sources available on the internet and social media. The findings indicate that poverty alleviation programs are more effective when implemented through collaboration among the government, the private sector, and the community. The government is responsible for policy formulation and program provision, the private sector contributes through Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives, while the community plays a role in program implementation and monitoring. This collaborative approach has a positive impact on the achievement of the SDGs, particularly in relation to no poverty, decent work and economic growth, and reduced inequality. However, several challenges still exist, including weak coordination among stakeholders, sectoral ego, and limited capacity of the involved actors, which hinder optimal implementation.*

Keywords: *Collaborative Management; Poverty; Public Management; SDGs; Sustainable Development.*

Abstrak. Kemiskinan masih menjadi masalah utama di Indonesia karena sifatnya yang kompleks dan multidimensional serta saling berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen kolaboratif dalam penanggulangan kemiskinan sebagai upaya mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data dari jurnal, media online, dokumen resmi, serta berbagai informasi yang beredar di internet dan media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan akan lebih efektif jika dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah berperan dalam perumusan kebijakan dan penyediaan program, sektor swasta berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), sedangkan masyarakat berperan dalam pelaksanaan dan pengawasan program. Pendekatan kolaboratif ini memberikan dampak positif terhadap pencapaian SDGs, khususnya pada tujuan tanpa kemiskinan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, serta pengurangan kesenjangan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti lemahnya koordinasi, ego sektoral, serta keterbatasan kapasitas para pelaku yang terlibat sehingga menghambat implementasi secara optimal.

Kata kunci: Kemiskinan; Manajemen Kolaboratif; Manajemen Publik; Pembangunan Berkelanjutan; SDGs.

1. LATAR BELAKANG

Salah satu permasalahan yang masih banyak ditemui dan dihadapi oleh negara Indonesia adalah tingkat kemiskinan tinggi. Menurut Sen (2001) dalam Yandri & Juanda (2018), kemiskinan merupakan kurangnya suatu kondisi sosial selain dari kekurangan pangan yang menciptakan penderitaan, seperti kurangnya dalam mendapatkan nutrisi, buta huruf, sipil tidak memiliki kebebasan dan hak dalam berdemokrasi, adanya diskriminasi dan intoleransi, pengidapan penyakit, dan berbagai bentuk perampasan hak-hak milik pribadi. Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensional sehingga menjadi salah satu

prioritas utama dalam pembangunan nasional. Selama ini, pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program untuk menanggulangi kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai sektor serta pemberian pelatihan keterampilan guna meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu mandiri secara ekonomi dan mencegah munculnya kemiskinan baru Royat (2015), sebagaimana dikutip dalam (Ferezagia 2018).

Data dari (Badan Pusat Statistik Indonesia. n.d.) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami fluktuasi setiap tahunnya dan masih terdapat banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, khususnya di wilayah tertinggal dan pedesaan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional belum sepenuhnya bersifat inklusif dan belum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Salah satu faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut adalah tingginya tingkat pengangguran, terutama pada kelompok usia produktif (Rahayu & Febriaty n.d.)

Berbagai program, seperti bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga pembangunan infrastruktur, dinilai belum sepenuhnya terintegrasi dengan tujuan pembangunan jangka panjang sebagaimana tercantum dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs merupakan agenda pembangunan global yang dideklarasikan pada tahun 2015 dan terdiri atas 17 tujuan utama. Salah satu tujuannya adalah “*No Poverty*” atau tanpa kemiskinan, yang menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2030.

Menurut Susha & Gil-Garcia (2019) dalam Lawelai & Nurmandi (2023) tata kelola atau manajemen kolaboratif merupakan pendekatan yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir karena dipandang sebagai solusi potensial dalam mengatasi kemiskinan. Pendekatan ini menekankan partisipasi aktif dan kolaborasi antarpemangku kepentingan, seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, dalam proses penanganan kemiskinan. Melalui tata kelola kolaboratif, tercipta pendekatan yang lebih terintegrasi dan efektif karena melibatkan beragam perspektif serta pengalaman para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan maupun implementasi kebijakan (Newig et al. 2018).

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Manajemen Publik

Manajemen dalam pengertian luas dapat dipahami sebagai suatu proses yang terdiri atas beberapa tahapan untuk mencapai tujuan tertentu. Tahapan tersebut meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan yang saling berkaitan satu sama lain (Sherly et al. 2020). Sedangkan manajemen publik merupakan bidang kajian yang

mempelajari bagaimana organisasi pemerintah bersama aktor nonpemerintah atau sektor swasta berkolaborasi dalam mengelola sumber daya publik guna menciptakan nilai bagi masyarakat. Fokus manajemen publik tidak hanya terbatas pada aspek efisiensi, tetapi juga mencakup legitimasi, keadilan, akuntabilitas, serta pembangunan kepercayaan publik. Dalam perkembangan literatur lima tahun terakhir, perhatian utama manajemen publik semakin mengarah pada penerapan tata kelola berbasis nilai publik (*public values governance*), penguatan kolaborasi lintasaktor, serta transformasi digital, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dalam fungsi-fungsi inti pemerintahan (Pola et al. 2026)

Teori Manajemen Kolaboratif

Teori manajemen kolaboratif dalam manajemen publik menekankan bahwa penyelesaian masalah publik, termasuk kemiskinan, tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan membutuhkan kerja sama antara berbagai aktor seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Kolaborasi dipahami sebagai proses pengambilan keputusan bersama yang melibatkan berbagai pihak secara aktif melalui dialog, kepercayaan, dan pembagian peran yang jelas (Haerana n.d.). Pendekatan ini sejalan dengan paradigma *New Public Governance* yang memposisikan pemerintah sebagai fasilitator, bukan aktor tunggal. Dalam konteks penanganan kemiskinan di Indonesia, pendekatan kolaboratif menjadi penting karena kemiskinan bersifat multidimensional, sehingga memerlukan sinergi lintas sektor agar kebijakan lebih efektif dan tepat sasaran (Muharram & Teknologi 2026).

SDGs dan Penanganan Kemiskinan

Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi kerangka penting dalam penanganan kemiskinan di Indonesia, terutama melalui keterkaitan antara SDGs poin pertama (*tanpa kemiskinan*), SDGs poin kedelapan (*pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi*), dan SDGs poin kesepuluh (*berkurangnya kesenjangan*). Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga terbatasnya akses terhadap pekerjaan dan ketimpangan distribusi kesejahteraan. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya melalui bantuan sosial, tetapi juga perlu didukung dengan penciptaan lapangan kerja yang layak serta upaya mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Ketiga tujuan ini saling melengkapi, sehingga membutuhkan pendekatan yang terintegrasi. (Dzulqarnain et al., 2024).

Konsep Kemiskinan

Menurut menurut Yacoub (2012) dalam Ferezagia (2018) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar, karena kemiskinan menyangkut mengenai pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan dan kemiskinan merupakan masalah global karena kemiskinan merupakan tantangan yang dihadapi oleh banyak negara. Menurut Rejekiningsih (2011) dalam Jacobus et al. (2018) kemiskinan juga

merupakan *cross sectors problem*, *cross areas* dan *cross generation*, sehingga untuk menanganinya memerlukan pendekatan yang terpadu, komprehensif dan berkelanjutan. Untuk mensukseskan program-program percepatan penanggulangan kemiskinan dibutuhkan *political will*. Konflik masalah kemiskinan ini sangat kompleks dan bersifat multidimensional, yang dimana konflik tersebut berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Kemiskinan ini terus menjadi masalah fenomenal, karena sifatnya yang multidimensional maka kemiskinan juga memerlukan solusi yang multidimensional pula. Berbagai program baik dari pemerintah pusat maupun daerah sudah diusahakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Bahkan kemiskinan menjadi salah satu agenda penting SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang menggantikan MDGs (*Millenium Development Goals*) di akhir 2015 (Jacobus et al. 2018).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Polit & Beck (2009; 2014), penelitian deskriptif kualitatif (*qualitative descriptive/QD*) merupakan salah satu bentuk penelitian kualitatif yang berfokus pada kajian yang bersifat deskriptif (Wiwin 2018). Jenis penelitian ini umumnya digunakan dalam kajian fenomenologi sosial untuk memahami berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan secara sistematis, faktual, dan akurat tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel penelitian. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti berupaya memahami kondisi objek penelitian secara mendalam berdasarkan data dan informasi yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu dengan cara mengolah, mengelompokkan, dan menyajikan data sehingga mudah dipahami. Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan data secara apa adanya tanpa melakukan generalisasi yang berlebihan, sehingga hasil penelitian tetap mencerminkan kondisi sebenarnya

Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti serta menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan dan penyusunan rekomendasi penelitian selanjutnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Manajemen Kolaboratif dalam Penanganan Kemiskinan

Implementasi manajemen kolaboratif dalam penanganan kemiskinan di Indonesia terlihat dari keterlibatan berbagai aktor yang saling melengkapi peran satu sama lain. Pendekatan ini tidak hanya mengandalkan kebijakan pemerintah, tetapi juga membuka ruang partisipasi bagi sektor swasta dan masyarakat. Dari sisi pemerintah, baik pusat maupun daerah memiliki posisi strategis sebagai pengarah utama kebijakan. Pemerintah pusat berperan dalam merumuskan program nasional, menetapkan regulasi, serta menyediakan anggaran untuk berbagai program penanggulangan kemiskinan seperti bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan sosial. Sementara itu, pemerintah daerah berfungsi sebagai pelaksana yang menyesuaikan kebijakan tersebut dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Peran daerah juga penting dalam memastikan bahwa program tepat (Dari et al. 2022).

Selain pemerintah, sektor swasta juga memiliki kontribusi yang cukup signifikan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Keterlibatan sektor swasta umumnya diwujudkan dalam bentuk bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, hingga pengembangan usaha mikro dan kecil. Program CSR tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi dalam jangka panjang. Dalam konteks manajemen kolaboratif, kehadiran sektor swasta memperluas sumber daya yang dapat dimanfaatkan, baik dari segi pendanaan, inovasi, maupun jaringan (Awwaluddin et al., 2023).

Di sisi lain, masyarakat juga memegang peran penting sebagai subjek sekaligus pelaku utama dalam penanganan kemiskinan. Partisipasi masyarakat dapat terlihat melalui keterlibatan dalam program pemberdayaan, pembentukan kelompok usaha bersama, hingga inisiatif lokal yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan lingkungan sekitar. Keterlibatan aktif masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan karena mereka yang paling memahami kondisi dan kebutuhan di lapangan. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program sehingga lebih transparan dan tepat sasaran (Al-amin 2009).

Analisis Efektivitas Kolaborasi

Penerapan manajemen kolaboratif dalam penanganan kemiskinan menunjukkan sejumlah capaian positif, meskipun masih dihadapkan pada berbagai kendala di lapangan. Dari sisi kelebihan, kolaborasi antar aktor mampu meningkatkan efektivitas program karena adanya pembagian peran yang lebih jelas dan pemanfaatan sumber daya yang lebih luas. Pemerintah dapat fokus pada penyusunan kebijakan dan regulasi, sementara sektor swasta berkontribusi melalui dukungan pendanaan dan inovasi, serta masyarakat berperan dalam pelaksanaan dan

pengawasan. Sinergi ini membuat program penanggulangan kemiskinan tidak hanya lebih terarah, tetapi juga menjangkau kelompok sasaran yang lebih luas (Handayani, Risyanti, and Simangunsong 2023).

Namun demikian, efektivitas kolaborasi belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat sejumlah hambatan. Salah satu kendala utama adalah adanya ego sektoral yang menyebabkan koordinasi antar pihak belum berjalan secara maksimal. Perbedaan kepentingan dan prioritas seringkali menghambat proses pengambilan keputusan bersama. Di samping itu, keterbatasan kapasitas, baik dari sisi sumber daya manusia maupun kelembagaan, juga menjadi tantangan, terutama di tingkat daerah dan masyarakat. Kurangnya integrasi data serta lemahnya sistem komunikasi antar aktor turut mempengaruhi akurasi penyaluran program sehingga berpotensi tidak tepat sasaran (Handayani et al. 2023).

Dampak Terhadap Pencapaian SDGs

Manajemen kolaboratif menunjukkan hasil yang positif dalam pencapaian SDGs, terutama pada SDGs 1. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi kemiskinan, tetapi juga menciptakan sistem pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pada SDGs 1 yaitu *No Poverty* (Tanpa Kemiskinan) yang bertujuan untuk mengakhiri masalah kemiskinan dalam segala bentuk secara global. Fokus dari tujuan SDGs pertama yang utama yaitu memberdayakan individu yang hidup dalam kondisi (Khovivatul 2025). Manajemen kolaboratif ini berhasil melibatkan berbagai sektor untuk mencapai meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan dengan melibatkan sektor pemerintah, swasta atau private, dan juga masyarakat.

Meskipun demikian, dampak positif ini masih menghadapi tantangan seperti ketimpangan kapasitas kelembagaan antar daerah, tumpang tindih program yang di mana hal tersebut diperlukan penguatan mekanisme akuntabilitas bersama dan komitmen politik yang berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan.

Analisis Perspektif Manajemen

Collaborative governance merupakan sebuah strategi baru dalam tata kelola pemerintahan yang dikembangkan dalam dua dekade terakhir (Pratama 2023). Penerapan manajemen kolaboratif (*collaborative governance*) dalam penanganan kemiskinan di Indonesia menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam meningkatkan efektivitas tata kelola kebijakan sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Dalam kondisi ini, posisi pemerintah tidak lagi berdiri sendiri sebagai satu-satunya aktor yang berperan secara tunggal. Pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator yang menjembatani kerja sama antara sektor swasta dan masyarakat. Pendekatan kolaboratif seperti ini muncul karena kemiskinan punya banyak sisi, sehingga membutuhkan gabungan antar

sumber daya, informasi, dan wewenang agar kebijakan yang dibuat benar-benar efektif dan bisa bertahan lama. Program CSR yang dibuat oleh sektor swasta ini bisa ikut membantu lewat pendanaan, pelatihan, maupun pemberdayaan ekonomi warga. Sementara itu, partisipasi masyarakat juga sangat berperan penting dalam memastikan program yang dijalankan di lapangan sudah berjalan sesuai rencana dan bisa diawasi langsung. Jika dilihat dari perspektif manajemen, kerja sama seperti ini sesuai dengan prinsip *good governance*, yang mengutamakan partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas. Selain itu, pola lintas sektor ini juga menunjukkan adanya penguatan jaringan atau *network governance* yang membuka ruang bagi lahirnya inovasi-inovasi sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Penanganan kemiskinan di Indonesia memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai pihak melalui manajemen kolaboratif. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta melalui program CSR, serta partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa penyelesaian masalah kemiskinan akan lebih efektif apabila dilakukan secara bersama-sama. Pendekatan ini mampu memperluas jangkauan program, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, serta mendukung terciptanya pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, penerapan manajemen kolaboratif juga memiliki keterkaitan yang kuat dengan pencapaian SDGs, khususnya tujuan tanpa kemiskinan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, serta pengurangan kesenjangan. Meskipun demikian, implementasi kolaborasi masih menghadapi beberapa kendala seperti lemahnya koordinasi, ego sektoral, dan keterbatasan kapasitas antar aktor, sehingga diperlukan upaya perbaikan agar program penanganan kemiskinan dapat berjalan lebih optimal (Peluang n.d.).

Untuk meningkatkan efektivitas manajemen kolaboratif dalam penanganan kemiskinan, diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat agar setiap program dapat berjalan secara terintegrasi dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas pendataan dan sistem komunikasi antar lembaga guna meminimalisir ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program. Di sisi lain, sektor swasta diharapkan tidak hanya berfokus pada bantuan jangka pendek, tetapi juga mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Partisipasi masyarakat juga perlu terus didorong melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan kapasitas komunitas lokal. Dengan kerja sama yang lebih baik dan berkesinambungan, upaya penanganan kemiskinan di Indonesia diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih luas sekaligus mempercepat pencapaian target SDGs.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Amin, T. (2009). Peran modal sosial dalam program penanggulangan kemiskinan. *Realita*, 14(1), 49–64. <https://doi.org/10.30762/realita.v14i1.234>
- Anto Rola Pola, et al. (2026). *Manajemen publik: Teori, praktik, dan tantangan kontemporer*.
- Awwaluddin, M., Ibad, A., & Huda, B. (2023). Implementasi program corporate social responsibility Bank Jatim Surabaya berbasis pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan produktivitas usaha mikro kecil menengah. *Ekoma*, 3(1), 462–475. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i1.2510>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (n.d.). *Jumlah dan persentase penduduk miskin menurut provinsi*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/UkVkWGJVZFNWakl6VWxKVFQwWjVWeTISZDNabVFUMDkjMw==/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi--2024.html?year=2023>
- Dari, D. W., Apriliyani, D., & Handayani, W. (2022). Implementasi pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta berbasis tata kelola kolaboratif dalam program Gandeng Gendong. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 1–8.
- Dzulqarnain, G. Z., Meigawati, D., & Basori, Y. F. (2024). Implementasi program sustainable development goals (SDGs) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Sukabumi. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 9(1), 109–116.
- Ferezagia, D. V. (2018). Analisis tingkat kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1). <https://doi.org/10.7454/jsht.v1i1.6>
- Haerana. (n.d.). *Network governance: Strategi kolaboratif dalam pengentasan kemiskinan pedesaan*.
- Handayani, N., Risyanti, R., & Simangunsong, F. (2023). Collaborative governance dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Wahana Bhakti Praja*, 13(1), 66–77. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v13i1.3329>
- Jacobus, E. H., Kindangen, P., & Walewangko, E. N. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan rumah tangga. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 19(7), 1–16. <https://doi.org/10.35794/jpek.19900.19.7.2018>
- Lawelai, H., & Nurmandi, A. (2023). *Jurnal ranah publik Indonesia kontemporer*.
- Muharram, M. (2026). Analisis kebijakan publik dalam perspektif tata kelola pemerintahan modern. *Jurnal Kebijakan Publik*, 6(2), 155–162.
- Mukorrobah, N. K. (2025). Kenali 17 tujuan SDGs dan penjelasannya. <https://unair.ac.id/kenali-17-tujuan-sdgs-dan-penjasannya/>
- Newig, J., Challies, E., Jager, N. W., & Kochskaemper, E. (2018). The environmental performance of participatory and collaborative governance: A framework of causal mechanisms. *Public Administration Review*, 46(2), 269–297. <https://doi.org/10.1111/psj.12209>
- Peluang, T. (n.d.). Integrasi good amil governance dan sustainable development goals (SDGs): Tantangan dan peluang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(2), 112–129.
- Pratama, I. N. (2023). Skema pengentasan kemiskinan ditinjau dari perspektif collaborative governance di Kota Mataram. *Jurnal Komunikasi dan Kebijakan*, 10(1), 61–77. <https://doi.org/10.59050/jkk.v10i1.221>

- Rahayu, S. E., & Febriaty, H. (n.d.). Upaya pengentasan kemiskinan menuju pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia. 50–64.
- Sherly, et al. (2020). *Pengantar manajemen publik dan bisnis*.
- Yandri, P., & Juanda, B. (2018). Memahami karakter kemiskinan perkotaan dengan pendekatan observasional. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 19, 75–84. <https://doi.org/10.18196/jesp.19.1.4276>
- Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *Quanta*, 2(2), 83–91. <https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>